

PERANCANGAN RUSUNAWA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SAROLANGUN

Mohd Rizki Ananda¹⁾, Elfida Agus²⁾, Ariyati³⁾

Progam Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Email: ra4522969@gmail.com, elfidaagus@bunghatta.ac.id, ariyati@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Besarnya permintaan permukiman di Kabupaten Sarolangun dibuktikan dengan tingginya peralihan fungsi lahan menjadi perumahan. Hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan wilayah permukiman baru. Pada tahun 2020 terdapat penurunan PNS yang tidak memiliki hunian dari tahun 2018 dari 57% menjadi 53%, namun tetap saja masih ada PNS yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun. Untuk mengatasi masalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun, pemerintah Sarolangun mengeluarkan kebijakan perencanaan rusunawa. Perencanaan rusunawa merupakan respon terhadap kebutuhan rumah bagi PNS di Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki hunian.

Kata kunci : *Hunian, Rusunawa, Pegawai Negeri Sipil*

PENDAHULUAN

Besarnya permintaan permukiman di Kabupaten Sarolangun dibuktikan dengan tingginya peralihan fungsi lahan menjadi perumahan. Hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan wilayah permukiman baru. Pada tahun 2020 terdapat penurunan PNS yang tidak memiliki hunian dari tahun 2018 dari 57% menjadi 53%, namun tetap saja masih ada PNS yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun. Untuk mengatasi masalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun, pemerintah Sarolangun mengeluarkan kebijakan perencanaan rusunawa. Perencanaan rusunawa merupakan respon terhadap kebutuhan rumah bagi PNS di Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki hunian.

METODE

Metode penelitian yang dipakai yaitu deskriptif, metode ini merupakan metode yang mendeskripsikan keadaan atau beberapa fenomena yang dengan akurat. Metode ini ditujukan untuk mengetahui beberapa hal keadaan tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil lapangan, wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi foto, dan data lain yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi tapak yang terpilih yaitu di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Indonesia.



Gambar 1. Lokasi Perencanaan
Sumber: Google Maps, 2021

Lokasi : Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun
Luas Site : 18.753m²
Lebar Jalan : 10 m

Batasan Tapak

Site memiliki batasan-batasan yaitu:

Utara : lahan hijau
Selatan : Jl. Lintas Sumatera
Timur : permukiman dan lahan hijau
Barat : permukiman dan lahan hijau

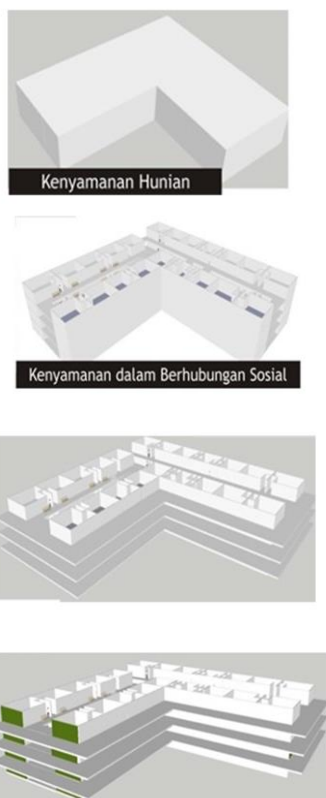
Konsep

Bentuk dasar L berasal dari Permen Pu Nomor 05 Tahun 2007 mengenai persyaratan penampungan bangunan gedung Rusunawa. Bentuk sederhana untuk mengantisipasi kerusakan akibat gempa.

Bentuk ini juga mampu menampung lebih banyak unit hunian dengan pencahayaan dan penghawaan cukup bagus pada semua sisi.

Pemberian ruang terbuka pada setiap sisi lantai 2,3,4 yang bias digunakan untuk ruang bersama

Beradaptasi dengan iklim pemberian green wall pada dinding tiap ujung sisi bangunan yang menghadap Timur-Barat atau Utara-Selatan untuk mengurangi panas masuk kedalam bangunan



Gambar 2. Konsep Desain
Sumber: Analisa Penulis, 2021

KESIMPULAN DAN SARAN

Perancangan Rusunawa PNS di Kabupaten Sarolangun ini merupakan sebuah Rusunawa yang menampung PNS Dinas Kesehatan yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun. Rusunawa ini diharapkan mampu mengurangi PNS yang belum

memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun. Dengan menciptakan desain Rusunawa yang mengambil bentuk dari bentuk L dengan bentuk simetris. Pencahayaan dan penghawaan didalamnya cukup bagus karena terdapat void ditengah bangunan dan semua sisi bangunan menghadap keluar bangunan.

Kebutuhan ruang terdiri dari Fungsi primer sebagai hunian bagi PNS yang menikah dan PNS yang belum menikah. Fungsi sekunder sebagai tempat bersosialisasi atau berkumpul antar penghuni dan sebagai sarana berniaga. Fungsi penunjang sebagai administrasi.

Lokasi Rusunawa dikategorikan strategis karena penghuni nantinya dekat dengan tempat bekerja. Oleh karena itu Perancangan Rusunawa PNS diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun yang belum memiliki hunian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- [2] Perda Kabupaten Sarolangun No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun 2014-2034

Jurnal

Suryo, M. S. (2017). Analisa Kebutuhan Luas Minimal Pola Rumah Sederhana Tapak Di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 12(2), 116-123.

Buku

Wicaksono, A. (2009). *Menciptakan rumah sehat*. Niaga Swadaya.

Prosiding seminar/konferensi:

Suci Kusumaningsih, W. A. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI MASYARAKAT. *Volume 1, Nomor 1, 2019, 1*, 14-23.

Yohanes Eudes Abitabira Mahardika Putra, D. I. (2021). PERANCANGAN RUSUNAWA PUTRI CEMPO DENGAN KONSEP BANGUNAN HEMAT ENERGI DI SURAKARTA. *Vol. 3, No. 1, Juni 2021, 3*, 23-30.

Skrripsi/ Tesis/ Disertasi:

Oktaviyana, C. (2016). *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Bukan Berpenghasilan Rendah di Kota Cimahi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun* (Doctoral dissertation, fakultas Hukum (UNISBA)).